

PENGADILAN AGAMA METRO LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun
2022

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

Metro - Lampung 34102

Telp. 0725-45068 Fax. 0725-45068

E-mail : pametro_lampung@yahoo.com



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA METRO**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

Metro - Lampung 34102

Telp. 0725-45068

e-mail : pametro_lampung@yahoo.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Metro adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Metro. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Metro, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,



H. BUNYAMIN, S.Ag

NIP.196804011992031004

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Metro, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,



H. BUNYAMIN, S.Ag

NIP.196804011992031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Metro	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	51

Lampiran dan Daftar

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Metro Tahunan T.A 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 54 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 1.312.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.389.579.259 atau mencapai 94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.718.393.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 15.402.471.363 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 48.245.011; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 15.354.226.352; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 45.369.500; dan Rp. 15.357.101.863.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 546.667, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 5.550.658.835; sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.550.112.168); Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 54 dan sebesar (Rp.5.550.112.114) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp. 5.550.112.114)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 15.377.101.432 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp. 5.550.112.114) ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 5.544.339.205, sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 15.357.101.863.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk disusun dan disajikan dengan basis

akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA METRO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022		%	31 DESEMBER 2021
		ESTIMASI / ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.312.000	54	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.312.000	54	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4.317.533.000	4.026.939.968	93,27	4.151.754.992
Belanja Barang	B.4	1.286.860.000	1.248.723.291	97,04	1.010.667.939
Belanja Modal	B.5	114.000.000	113.916.000	99,93	264.500.000
JUMLAH BELANJA		5.718.393.000	5.389.579.259	94,25	5.426.922.931

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA METRO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	34.152.500	
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	235.583
Persediaan	C.9	14.092.511	5.050.181
Persediaan Belum Diregister	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		48.245.011	5.285.764
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	5.829.194.000	5.829.194.000
Peralatan dan Mesin	C.15	2.705.614.753	2.505.798.905
Gedung dan Bangunan	C.16	9.684.215.789	9.654.215.789
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	597.369.000	597.369.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	3.990.687	3.990.687
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(3.466.157.877)	(3.207.381.934)
Jumlah Aset Tetap		15.354.226.352	15.383.186.447
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	20.750.000	20.750.000
Aset Lain-Lain	C.22	-	127.487.650
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(20.750.000)	(161.962.650)
Jumlah Aset Lainnya		-	(13.725.000)
JUMLAH ASET		15.402.471.363	15.374.747.211
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	10.824.112
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	45.369.500	546.667
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		45.369.500	11.370.779
JUMLAH KEWAJIBAN		45.369.500	11.370.779
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	15.357.101.863	15.377.101.432
JUMLAH EKUITAS		15.357.101.863	15.377.101.432
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.402.471.363	15.388.472.211

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	546.667	656.000
JUMLAH PENDAPATAN		546.667	656.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4.037.367.126	4.152.544.834
Beban Persediaan	D.3	24.311.370	22.877.705
Beban Barang dan Jasa	D.4	886.501.286	741.253.457
Beban Pemeliharaan	D.5	303.049.770	215.498.167
Beban Perjalanan Dinas	D.6	20.630.000	27.950.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	278.799.283	556.499.591
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		5.550.658.835	5.716.623.754
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.550.112.168)	(5.715.967.754)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		54	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		54	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.550.112.114)	(5.715.967.754)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.550.112.114)	(5.715.967.754)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
EKUITAS AWAL	E.1	15.377.101.432	15.648.789.046
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.550.112.114)	(5.715.967.754)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	(14.226.660)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	(14.226.660)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		(14.226.660)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	5.544.339.205	5.444.280.140
EKUITAS AKHIR	E.5	15.357.101.863	15.377.101.432

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Metro

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Visi Pengadilan Agama Metro adalah Pengadilan Agama Metro mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Agama Metro sebagai berikut:

Misi Pengadilan Agama Metro adalah Pengadilan Agama Metro menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatnya kualitas pimpinan badan peradilan.
4. Meningkatnya kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Metro menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro.
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Lalu dari tujuan strategis di atas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Metro. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulaidari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Metro menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis

kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Metro dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Agama Metro. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan

sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan

mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp. 54

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 54 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.312.000. Pendapatan Pengadilan Agama Metro terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, serta Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 Juni 2021		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan bangunan	4.510.000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun yang lalu	-	-	-
Jumlah	4.510.000	-	-

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, dibandingkan per 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan serta tidak ada Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	54	-	0,00
Jumlah	54	-	0,00

Realisasi
Belanja
Negara Rp.
5.389.579.259

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.426.922.931 atau 95,84 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.662.772.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.317.533.000	4.026.939.968	93,27
Belanja Barang	1.286.860.000	1.248.723.291	97,04
Belanja Modal	114.000.000	113.916.000	99,93
Total Belanja Kotor	5.718.393.000	5.389.579.259	94,25
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	5.718.393.000	5.389.579.259	94,25

Dibandingkan dengan realisasi belanja 31 Desember 2021, Realisasi Belanja 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 0,69% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya jumlah belanja barang dan belanja modal

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.026.939.968	4.151.754.992	(3,01)
Belanja Barang	1.248.723.291	1.010.667.939	23,55
Belanja Modal	113.916.000	264.500.000	(56,93)
Jumlah	5.389.579.259	5.426.922.931	(0,69)

Belanja
Pegawai Rp.
4.026.939.968

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 4.026.939.968 dan Rp.4.151.754.992. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.724.449.520	1.642.129.600	5,01
Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.862	22.191	12,04
Belanja Tunj. Suami Istri PNS	114.848.800	104.411.962	10,00
Belanja Tunj. Anak PNS	36.868.172	36.870.240	(0,01)
Belanja Tunj. Struktural PNS	38.160.000	40.320.000	(5,36)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.536.400.000	1.732.830.000	(11,34)
Belanja Tunj. PPh PNS	204.465.352	238.847.414	(14,39)
Belanja Tunj. Beras PNS	90.307.740	84.803.820	6,49
Belanja Uang Makan PNS	267.656.000	261.660.000	2,29
Belanja Tunj Umum PNS	15.475.000	10.045.000	54,06
Belanja Uang Lembur PNS	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	4.028.655.446	4.151.940.227	(2,97)
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.715.478)	(185.235)	826,11
Jumlah Belanja	4.026.939.968	4.151.754.992	(3,01)

Belanja
Barang Rp.
1.248.723.291

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.248.723.291 dan Rp. 1.010.667.939. Realisasi belanja barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 23.55% dari realisasi belanja barang 31 Desember 2021.

*Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	695.800.299	553.798.650	25,64
Belanja Barang Non Operasional	9.990.000	4.999.500	99,82
Belanja Barang Persediaan	46.832.400	37.994.900	23,26
Belanja Jasa	185.899.522	181.698.161	2,31
Belanja Pemeliharaan	289.571.070	204.226.728	41,79
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20.630.000	27.950.000	(26,19)
Jumlah Belanja Kotor	1.248.723.291	1.010.667.939	23,55
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.248.723.291	1.010.667.939	23,55

Belanja Modal

Rp.

113.916.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 113.916.000 dan Rp. 114.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 56,93% dibandingkan 31 Desember 2021 disebabkan karena meningkatnya pagu belanja modal pada tahun ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.916.000	264.500.000	(68,27)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000	0	0,00
Belanja Modal Lainnya (anti Virus)	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	113.916.000	264.500.000	-56,93
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	113.916.000	264.500.000	-56,93

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Uang Tunai	-	0
BRI Cabang Metro A/C 00000130.01.000084.30.8	0	0
Jumlah	-	0

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mempunyai rekening Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Uang Tunai	-	-
Uang di Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.34.152.500

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 34.152.500 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	34.152.500	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	34.152.500	-

Piutang PNBP Rp. 0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum

diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR Rp. 0 Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar TPA Rp. 0 **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

TPA Rp. 0 Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp. 0 **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp. 0 Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang

lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp. 0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persekot/ Uang muka gaji	-	235.583
Jumlah	-	235.583

*Persediaan
Rp.14.092.511*

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.14.092.511 dan Rp.5.050.181.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	14.092.511	5.050.181
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Jumlah	14.092.511	5.050.181

Persediaan
Belum
Diregister Rp. 0

C.10 Persediaan Belum Diregister

Nilai Persediaan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Persediaan Belum Diregister dengan nilai minus muncul dikarenakan barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional kantor telah dibeli akan tetapi pembelian tersebut belum diajukan (GU) ke KPPN. Rincian Persediaan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan Belum Diregister	-	-
Jumlah	-	-

Tagihan
TP/TGR
Rp. 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar

hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp. 0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp. 0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp.
5.829.194.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Metro per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.5.829.194.000 dan Rp. 5.829.194.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah :	0
Mutasi kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2022	5.829.194.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah

sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2022

No	Luas	Peruntukan	Nilai
1	355 m2	Rumah Dinas PA Metro	494.831.000
2	5315 m2	Gedung Kantor PA Metro	5.334.363.000
Jumlah			5.829.194.000

*Peralatan dan
Mesin Rp.
2.705.614.53*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 2.705.614.53 dan Rp. 2.505.798.905. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	2.505.798.905
Mutasi tambah :	199.815.848
- Pembelian/Transfer Masuk	199.815.848
Mutasi kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2022	2.705.614.753
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-2.105.968.529
Nilai Buku per 31 Desember 2022	599.646.224

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.
9.684.215.789*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 9.684.215.789 dan Rp. 9.654.215.789. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	9.654.215.789
Mutasi tambah :	30.000.000
Mutasi kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2022	9.684.215.789
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1.245.096.062)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	8.439.119.727

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp.
597.369.000*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 597.369.000 dan Rp. 597.369.000.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	597.369.000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2022	597.369.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(390.824.068)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	206.544.932

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp. 3.990.687*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 3.990.687 dan Rp. 3.990.687. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	3.990.687
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2022	3.990.687
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	3.990.687

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp. 0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp.
3.486.654.046*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp. 3.486.654.046 dan Rp. 3.207.381.934.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2022*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.705.614.753	2.105.968.529	599.646.224
2	Gedung dan Bangunan	9.684.215.789	1.245.096.062	8.439.119.727
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	597.369.000	390.824.068	206.544.932
4	Aset Tetap Lainnya	3.990.687	0	3.990.687
Jumlah		12.991.190.229	3.741.888.659	9.249.301.570

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp.
20.750.000*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 20.750.000 dan Rp. 20.750.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Agama Metro berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 desember 2021	20.750.000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 desember 2022	20.750.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 desember 2022	(20.750.000)
Nilai Buku per 31 desember 2022	0

Aset Lain-
Lain Rp. 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0 dan Rp. 127.487.650.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	127.487.650
Mutasi tambah:	13.725.000
Mutasi kurang:	-141.212.650
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.
(20.750.000)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp. (20.750.000) dan Rp. (0)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset
Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	20.750.000	20.750.000	0
Jumlah	20.750.000	20.750.000	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	20.750.000	20.750.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp.0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.
45.369.500*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.45.369.500 dan Rp. 10.824.112. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.546.667. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Ekuitas
Rp.
15.357.101.86
3*

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.357.101.863 dan Rp. 15.377.101.432. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP Rp. 0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 1.312.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Persekot / Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	-	-	#DIV/0!

*Beban
Pegawai Rp.
4.037.367.126*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.037.367.126 dan Rp. 4.152.544.834

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.723.747.208	1.642.804.900	4,93
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.384	22.191	9,88
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	(235)	(100,00)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	114.781.270	104.479.492	9,86
Beban Tunj. Anak PNS	36.868.172	36.897.252	(0,08)
Beban Tunj. Struktural PNS	38.160.000	40.320.000	(5,36)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.534.665.000	1.732.850.000	(11,44)
Beban Tunj. PPh PNS	204.465.352	238.847.414	(14,39)
Beban Tunj. Beras PNS	90.307.740	84.803.820	6,49
Beban Uang Makan PNS	278.873.000	261.660.000	6,58
Beban Tunjangan Umum PNS	15.475.000	9.860.000	56,95
Beban Uang Lembur	0	0	-
Jumlah	4.037.367.126	4.152.544.834	(2,77)

Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan Rp. 24.311.370

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.311.370 dan Rp. 22.877.705. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	24.311.370	22.877.705	6,27
Jumlah	24.311.370	22.877.705	6,27

Beban Barang dan Jasa Rp. 886.501.286

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 886.501.286 dan Rp. 741.253.457. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya beban barang operasional lainnya sampai dengan bulan Desember 2022.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	625.241.442	466.726.167	33,96
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas	682.550	748.000	(8,75)
Beban honor operasional satker	33.600.000	33.600.000	0,00
Beban barang operasional lainnya	36.511.890	51.675.700	(29,34)
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	9.990.000	-	#DIV/0!
Beban bahan	-	-	0,00
Beban barang non operasional lainnya-Penanganan Pandemi COVID	-	4.999.599	0,00
Beban Langganan Listrik	106.612.410	96.160.044	10,87
Beban Langganan Telepon	10.802.162	11.744.046	(8,02)
Beban Sewa	58.450.680	75.600.000	(22,68)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	4.610.152		
Jumlah	886.501.286	741.253.556	19,59

Beban

Pemeliharaan

Rp.

303.049.770

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 303.049.770 dan Rp.215.498.167. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. penurunan beban pemeliharaan karena berkurangnya jumlah pagu anggaran yang digunakan untuk renovasi gedung kantor dan rumah dinas. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171.406.000	83.238.685	105,92
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi COVID 19	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	23.697.500	47.396.500	(50,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.467.570	73.591.543	28,37
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	13.478.700	11.271.439	19,58

Beban

Perjalanan

Dinas Rp.

20.630.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.630.000 dan Rp. 27.950.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh turunnya jumlah Undangan dan konsultasi yang dibebankan pada DIPA kantor.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember

2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	18.230.000	24.350.000	(25,13)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000	3.600.000	(33,33)
Jumlah	20.630.000	27.950.000	(26,19)

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Dalam hal ini, Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mempunyai beban untuk diserahkan pada masyarakat.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban

Bantuan

Sosial Rp. 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena tidak ada pagu anggaran untuk beban bantuan sosial.

Beban

Penyusutan

dan Amortisasi

Rp.

278.799.283

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 278.799.283 dan Rp. 556.499.591.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai

berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	135.114.730	269.782.659	(49,92)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	105.744.329	210.836.483	(49,85)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	36.545.083	73.090.167	(50,00)
Beban Penyusutan Irigasi dan Jaringan	1.395.141	2.790.282	(50,00)
Jumlah Penyusutan	278.799.283	556.499.591	(49,90)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp. 0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. 54.

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional periode per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar

Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Periode per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pelepasan Aset Non Lancar	0	0	-
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	54	0	#DIV/0!
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	54	0	#DIV/0!

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

Pos Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**

Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Pos Luar Biasa sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i>	E.1 Ekuitas Awal
<i>Rp.</i> 15.377.101.432	Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.377.101.432 dan Rp. 15.648.789.046.
<i>Surplus/Defisit LO</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO
<i>Rp.</i> (5.550.112.114)	Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (5.550.112.114) dan Rp. (5.715.967.754). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i>	E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset
<i>Rp. 0</i>	Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i>	E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan
<i>Rp.</i> 0	Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp.0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi Aset

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non Revaluasi Rp. (14.226.660)

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp. 14.226.660) dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(14.226.660)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	(14.226.660)

Koreksi Lain-Lain Rp. 0

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Jumlah	0

Transaksi

E.4 Transaksi Antar Entitas

Antar Entitas

Rp.

5.544.339.205

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.544.339.205 dan Rp. 5.444.280.140. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.389.579.259
Diterima Dari Entitas Lain	(54)
Transfer Masuk	154.760.000
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	5.544.339.205

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Diterima dari Entitas lain

Rp. 54 dan

Ditagihkan ke Entitas lain

Rp.

5.389.579.259

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 5.389.579.259.

Transfer masuk
Rp.
154.760.000
dan
Transfer Keluar
Rp. 0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	BUA MA RI	154.760.000
2	Persediaan	-	-
Jumlah		-	-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0.

Pengesahan
Hibah Langsung
Rp. 0

Pengembalian
Pengesahan
Hibah Langsung
Rp. 0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp. 0.

Ekuitas Akhir
Rp.
15.357.101.863

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.357.101.863 dan Rp. 15.377.101.432.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian yang penting apapun setelah tanggal neraca di satuan Kerja Pengadilan Agama Metro untuk periode per 31 Desember 2022 yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN :

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut BPK pada periode 31 Desember 2022.

F.2.2 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Metro adalah:

- BRI CABANG METRO A/C 653244023551000 an. BPG 126 PA Metro 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA MARI dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0.

F.2.3 Revisi DIPA

Pada Periode yang berakhir 31 Desember 2022 Satuan Kerja Pengadilan Agama Metro terdapat revisi DIPA sebagai berikut : Revisi ke-7, tanggal 30 November 2022 terdapat perubahan nilai pada Belanja Pegawai terkait Pagu Minus.

F. 2.4 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP dan SSPB Pada Periode yang berakhir 31 Desember 2022 di Satuan Kerja Pengadilan Agama Metro.

F.2.5 Catatan Penting Lainnya

- Tidak terdapat catatan penting pada kantor Pengadilan Agama Metro untuk periode 31 Desember 2022 yang dapat diungkapkan pada Laporan keuangan ini.

PENGADILAN AGAMA METRO
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31 Desember 2022	Nilai Buku Per 31 Desember 2022
A	Peralatan dan Mesin				
1	Alat Bantu	2	17.661.100	17.661.100	-
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	3	502.779.117	319.570.545	183.208.572
3	Alat Kantor	26	134.433.492	114.376.219	20.057.273
4	Alat Rumah Tangga	242	837.294.006	762.061.279	75.232.727
5	Alat Studio	20	75.128.000	45.896.000	29.232.000
6	Alat Komunikasi	15	26.010.000	26.010.000	-
7	Alat Kedokteran	4	5.279.848	1.847.969	3.431.879
8	Komputer Unit	64	892.490.600	640.587.650	251.902.950
9	Peralatan Komputer	20	214.506.590	177.925.767	36.580.823
10	Peralatan Olahraga	1	32.000	32.000	-
	Jumlah	397	2.705.614.753	2.105.968.529	599.646.224
B	Gedung dan Bangunan				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	11	8.505.825.789	1.043.819.706	7.462.006.083
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3	708.979.000	132.299.569	576.679.431
3	Tugu/Tanda Batas	3	469.411.000	68.976.787	400.434.213
	Jumlah	17	9.684.215.789	1.245.096.062	8.439.119.727
C	Jalan dan Jembatan				
1	Jalan	1261	518.485.000	372.016.917	146.468.083
	Jumlah	1261	518.485.000	372.016.917	146.468.083
D	Irigasi				
1	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2	44.278.000	10.588.226	33.689.774
	Jumlah	2	44.278.000	10.588.226	33.689.774
E	Jaringan				
1	Jaringan Listrik	1	34.606.000	8.218.925	26.387.075
	Jumlah	1	34.606.000	8.218.925	26.387.075
F	Aset Tetap Lainnya				
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	25	3.990.687	0	3.990.687
	Jumlah	25	3.990.687	-	3.990.687
G	Software				
1	Aset tak Berwujud	1	20.750.000	20.750.000	-
	Jumlah	1	20.750.000	20.750.000	0
	Total		13.011.940.229	3.762.638.659	9.249.301.570

* Beban Amortisasi